

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja BP4D.....	3
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra.....	5
2.2. Analisis Kinerja	5
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	6
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD.....	7
BAB.III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	8
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	8
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	8
3.3. Program dan Kegiatan	11
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	12
BAB V PENUTUP	13

DAFTAR TABEL :

Tabel 2.2.	Evaluasi APBD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD BPPPPD Kabupaten Flores Timur
Tabel 3.2.	Rencana Program dan Kegiatan BPPPPD Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022

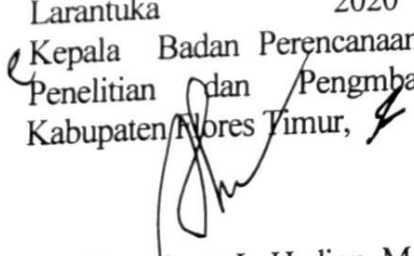
KATA PENGANTAR

Patut kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini merupakan kewajiban seluruh OPD dalam menyusun Rencana kerja tahunan Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD. Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 ini, untuk itu usul dan saran perbaikan menjadi masukan yang berharga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Flores Timur pada masa yang akan datang.

Akhirnya segala usul/saran untuk penyempurnaan dokumen ini serta membantu meningkatkan kinerja BPPPPD Kabupaten Flores Timur di masa mendatang sangat kami harapkan.

Larantuka 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur,


Drs. Theodorus L. Hadjon, M Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620125 198503 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan pola perencanaan pembangunan daerah, dari *system top-down* (dari atas ke bawah) sekarang *bottom-up* (dari bawah ke atas). Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat.

Rencana kerja tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam menyusun rencana pembangunan daerah maka harus memperhatikan 9 Asas Umum Penyelenggaraan Negara yaitu :

1. Asas Kepastian Hukum : mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
2. Asas Tertib Penyelenggara Negara : menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
3. Asas Kepentingan Umum : mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif,
4. Asas Keterbukaan : membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara;
5. Asas Proporsionantas : mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara;
6. Asas Profesionalitas : mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Asas Akuntabilitas : setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
8. Asas Efisiensi : memperhatikan kebutuhan pelayanan yang sederhana, cepat dan murah, tidak memberikan pembebanan biaya kepada masyarakat secara tidak wajar sesuai dengan peraturan;
9. Asas Efektifitas : mencapai penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Badan Perencanaan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program/kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.

Dalam penyusunan Renja maka yang ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pertama-tama pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. RPJPD adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah rancangan Renstra OPD Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra OPD.

RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) digunakan sebagai pedoman/ acuan dalam penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan APBD tahun berjalan.

Begitu pula Renja BPPPPD adalah merupakan penjabaran dari Renstra BPPPPD dan dalam penyusunannya mengacu pada RKPD. Renja sebagai bahan masukan untuk penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja Anggaran OPD). Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan DPA-OPD.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.;
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 40 Tahun 2019 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Kerja adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sedangkan tujuannya adalah mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Renstra dan RKPD serta memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra.

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian program/kegiatan dan realisasi.

Pada tahun 2018 ada 12 Program dan 38 kegiatan dengan tingkat realisasi mencapai 89,52% sesuai rencana sebagai upaya peningkatan pelaksanaan tugas dan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pada tahun 2019 BPPPPD melaksanakan 12 program dan 36 kegiatan, data yang ada dapat di ketahui bahwa target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan dapat terealisasi. Dengan tingkat realisasi 92,14%.

Hasil Pelaksanaan Renja tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dicermati pada Tabel 2.2

Sedangkan tingkat capaian renstra merupakan hasil akumulasi kegiatan tahunan secara berkesinambungan ditunjukkannya dengan semakin meningkatnya upaya koordinasi, sinkronisasi, sinergitas serta kualitas dokumen perencanaan, dapat di lihat pada Tabel 2.1

2.2 Analisis Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, BPPPPD sebagai perencana pembangunan daerah yang meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah disingkat RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
3. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. RPJP daerah dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a dan b berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD, pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD, sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah serta sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten.
- b. Penyusunan Kebijakan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah penelitian dan pengembangan
- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- d. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan
- e. Pembinaan Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- f. Pengelolaan administrasi Badan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Untuk mendukung pencapaian visi Kabupaten Flores Timur yaitu '**Flores Timur Sejahtera Dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**' (Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022) maka BPPPPD Kabupaten Flores Timur bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sinergis, partisipatif dan akuntabel. Yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD

dan antar OPD.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh OPD dalam menyusun Rencana Strategis dan Renja OPD.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Dengan mengacu tugas dan fungsinya BPPPPD Kabupaten Flores Timur berdasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 95 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur salah satunya melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah diarttaranya adalah Penyusunan RKPD tahun 2020 yang dalam pelaksanaannya diawali dengan musrenbang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten. Serta forum OPD untuk penyelarasan usulan program/kegiatan kecamatan dengan program/kegiatan OPD dan antar OPD.

Selain memaduserasikan program/kegiatan termasuk pula rencana dan tingkat capaian indikator daerah secara makro, sehingga seluruh rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan BPPPPD tahun 2020 merupakan upaya guna pencapaian indikator makro daerah diantaranya :

- a. Pertumbuhan Ekonomi ditargetkan 4,64%
- b. Tingkat Inflasi ditargetkan 4,76%
- c. Tingkat Kemiskinan ditargetkan 10,96 %

Untuk selanjutnya disinergikan masing-masing program dan kegiatan seluruh OPD guna pencapaian indikator tersebut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Flores Timur

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Flores Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Restra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan		Rp 42.239.656.284	Rp 3.435.744.879		Rp 3.430.032.866		Rp 5.814.710.166	Rp 12.680.487.911	30%
	Bidang Urusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp 42.239.656.284	Rp 3.435.744.879		Rp 3.430.032.866		Rp 5.814.710.166	Rp 12.680.487.911	30%
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Rp 6.296.038.263	Rp 634.470.692	96%	Rp 616.796.377	91,36	Rp 850.907.709	Rp 2.102.174.778	33%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat (perangko dan meterai)	Rp 28.693.970	Rp 546.000	800 Lembar	Rp 834.000	54,87	Rp 5.687.000	Rp 7.067.000	25%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening (telepon, listrik, Air dan Kawat/faximile/internet)	Rp 899.403.332	Rp 81.741.368	12 bulan	Rp 37.394.708	67,76	Rp 120.000.000	Rp 239.136.076	27%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Rp 22.012.549	Rp 6.219.175	18 unit	Rp 5.453.000	59,27	Rp 10.000.000	Rp 21.672.175	98%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terbayarnya honorarium pengelola keuangan dan pengelola barang OPD	Rp 202.147.798	Rp 33.111.300	12 kali	Rp 27.961.300	84,45	Rp 40.064.673	Rp 101.137.273	50%
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	Rp 30.336.089	Rp 4.965.000	20 jenis	Rp 7.188.750	99,88	Rp 8.000.000	Rp 20.153.750	66%
	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Rp 91.659.682	Rp 26.950.000	29 jenis	Rp 15.320.000	99,86	Rp 18.166.486	Rp 60.436.486	66%
	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Rp 154.031.673	Rp 25.619.800	490 buku	Rp 33.975.000	100	Rp 30.528.300	Rp 90.123.100	59%
	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Rp 26.679.287	Rp 4.370.000	3 komponen	Rp 6.010.000	98,03	Rp 5.287.700	Rp 15.667.700	59%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan (Pos kupang, Flores Pos, Flobamor, dan iklan)	Rp 36.142.192	Rp 3.075.000	750 eksemplar	Rp 3.240.000	60,45	Rp 7.163.200	Rp 13.478.200	37%
	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum kantor	Rp 293.044.800	Rp 20.005.000	2500 dos	Rp 21.240.000	100	Rp 58.080.000	Rp 99.325.000	34%
	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 1.500.511.478	Rp 232.368.049	35 kali	Rp 261.529.600	98,33	Rp 297.393.800	Rp 791.291.449	53%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung dan Teknik Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung dan teknis perkantoran (org)	Rp 1.264.091.481	Rp 195.500.000	15 orang	Rp 196.650.019	89,04	Rp 250.536.550	Rp 642.686.569	51%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah sarana dan prasarana aparatur	Rp 1.775.977.904	Rp 548.441.934	97%	Rp 257.312.481	95,54	Rp 252.889.825	Rp 1.058.644.240	60%
	Kegiatan pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Rp -	Rp 212.462.456	1 unit			Rp -	Rp 212.462.456	#DIV/0!
	Kegiatan Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	Terlaksananya Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman	Rp 704.900.000	Rp 215.925.000	1 paket			Rp -	Rp 215.925.000	31%
	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Rp 175.000.000	Rp -		Rp -		Rp -	Rp -	0%
	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan gedung	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	Rp 150.000.000	Rp -	1 paket	Rp 71.528.800	93,56	Rp 100.000.000	Rp 171.528.800	114%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Rp 87.000.000	Rp 20.000.000	1 paket	Rp 102.357.681	94,38	Rp -	Rp 122.357.681	141%
	Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeler	Rp 15.000.000	Rp 17.500.000				Rp -	Rp 17.500.000	117%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terawatnya gedung kantor	Rp 105.728.648	Rp -	1 unit	Rp 14.361.500	93,9	Rp 26.372.225	Rp 40.733.725	39%
	Kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya Kendaraan dinas Operasional	Rp 424.670.756	Rp 43.254.478	18 unit	Rp 49.114.500	99,75	Rp 84.167.600	Rp 176.536.578	42%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terawatnya perlengkapan gedung kantor	Rp 61.051.000	Rp 16.350.000	21 unit	Rp 9.975.000	99,75	Rp 12.100.000	Rp 38.425.000	63%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Rp 152.827.500	Rp 22.950.000	44 unit	Rp 9.975.000	100	Rp 30.250.000	Rp 63.175.000	41%

Kode	Lulusan Bidang Lulusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Rencstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Rencstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Perangkat Daerah s/d Rencja Perangkat Daerah n-3(2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2019)				Target Program dan Kegiatan Tahun 2020				Pertemuan Realisasi Capaian Target Rencstra sampai Tahun berjalan			
					6	7	8	9	Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Target Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Realisasi %	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7-9)	11=10/4						
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	PNS yang mengikuti bimtek/sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur	Rp 643.782.795	57.751.000	97%	Rp 48.533.500	89,9	Rp 55.000.000	Rp 171.284.500	27%						
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlatihnya Aparatur Perencanaan Daerah	Rp 643.782.795	57.751.000	4 orang	Rp 48.533.500	89,88	Rp 55.000.000	Rp 171.284.500	27%						
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja	Rp 183.727.795	22.525.400	92%	Rp 29.965.000	99,9	Rp 36.413.922	Rp 88.904.322	48%						
	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja, Realisasi Keuangan, dan	Tersedianya laporan capaian kinerja SKPD (RKA, Laki, Revisi Rencstra dan Rencja)	Rp 183.727.795	22.525.400	6 Dokumen	Rp 29.965.000	99,9	Rp 36.413.922	Rp 88.904.322	48%						
	Program Pengembangan Data / Informasi	Jumlah dokumen data dan informasi	Rp 950.832.125	159.188.000	1 Dokumen	Rp 152.418.000	99,45	Rp 152.964.570	Rp 464.570.570	49%						
	Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan	Tersedianya data dan informasi/kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Rp 211.534.669	-	1 Dokumen			Rp 32.925.599	Rp 32.925.599	16%						
	Kegiatan Penyusunan Profile Daerah	Tersedianya buku Profil Daerah	Rp 397.632.359	80.034.000	1 Dokumen	Rp 110.625.500	99,26	Rp 69.980.042	Rp 260.639.542	66%						
	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Informasi pembangunan daerah dapat diketahui masyarakat serta menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah	Rp 153.163.396	39.600.000	12 bulan	Rp 41.792.500	99,97	Rp 21.527.528	Rp 102.920.028	67%						
	Kegiatan Pengumpulan dan Penyusunan Data/Informasi Geospasial	Tersedianya data/informasi geospasial dan koordinasi pemetaan	Rp 188.501.701	39.554.000	1 Dokumen			Rp 28.531.401	Rp 68.085.401	36%						
	Program Kerjasama Pembangunan	Rasio LSM/NGO yang aktif bekerja sama	Rp 1.309.390.163	148.816.650	11 LSM/NGO	Rp 85.045.028	80,55	Rp 100.000.000	Rp 333.861.678	25%						
	Kegiatan Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO	Rasio LSM/NGO yang aktif bekerja sama	Rp 1.309.390.163	148.816.650	11 LSM/NGO	Rp 85.045.028	94,09	Rp 100.000.000	Rp 333.861.678	25%						
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan Perencanaan	Rp 432.873.446	48.714.100	35%	Rp 33.420.900	84,09	Rp 50.000.000	Rp 132.135.000	31%						
	Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Tertaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Rp 432.873.446	48.714.100	100 orang	Rp 33.420.900	87,36	Rp 50.000.000	Rp 132.135.000	31%						
	Kegiatan Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah	Tertaksananya sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Rp 432.873.446	-	97 orang			Rp -	Rp -	0%						
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	Rp 8.890.666.191	1.105.150.716	12 dokumen	Rp 860.942.930	87,36	Rp 1.671.905.128	Rp 3.637.998.774	41%						

Kode	Urutan Bidang / Urutan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada tahun / siklus periode Rencana Perangkat Daerah	Realisasi / Capaian Kinerja Rencana Perangkat Daerah s/d Rencana Perangkat Daerah n-2 (2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-1 (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perbaikan Realisasi Capaian Target Rencana Program Tahun berjalan	
					Target Rencana Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Rencana Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi / Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5-7-9)	11=10/4
	Kegiatan Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2019 - 2021	Rp 2.252.625.718	Rp 339.364.260	1 dokumen	Rp 196.012.000	97,55	Rp 400.000.000	Rp 196.012.000	50%
	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Terlaksananya Musrenbang RPJMD	Rp 1.570.795.618	Rp 185.472.696	1 Dokumen	Rp 190.571.740	94,55	Rp 250.000.000	Rp 624.368.436	40%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi DAK, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Rp 538.523.875	Rp 43.408.400	2 dokumen	Rp 111.822.960	98,41	Rp 60.000.000	Rp 230.188.960	40%
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah	Terlaksananya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pembangunan daerah	Rp 820.858.064	Rp 148.275.000	2 dokumen	Rp 149.012.150	98,27	Rp 140.956.128	Rp 408.248.278	53%
	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Rp -		Rp 13.504.000	11,98	Rp -	Rp 13.504.000	40%/0%
	Evaluasi Midterm RPJMD	Tersedianya dokumen Evaluasi Midterm RPJMD	Rp 300.000.000	Rp -	2 dokumen	Rp -		Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	100%
	Evaluasi RPJPD	Tersedianya dokumen evaluasi RPJPD			4 dokumen			Rp 300.000.000	Rp 300.000.000	40%/0%
	Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS, dan KUA&PPAS Perubahan	Rp 2.479.662.916	Rp 388.628.360	2 dokumen			Rp -	Rp 388.628.360	16%
	Penyusunan Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran Terpadu	Rp 928.200.000		6 Dokumen	Rp -		Rp 220.000.000	Rp 220.000.000	24%
	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Rp 2.348.319.206	Rp 214.580.860	1 Dokumen	Rp 220.561.860	92,7	Rp 377.425.012	Rp 812.567.732	35%
	Koordinasi Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Rp 634.983.549	Rp 47.590.000	1 Dokumen	Rp 75.621.000	85,38	Rp 118.043.445	Rp 241.854.445	38%
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Daerah Bawahan	Terselenggaranya Rapat Sosialisasi, Koordinasi, Evaluasi, Monitoring PRUKAB, Anggur Merah dan Replikasinya serta Gerbang Emas Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat	Rp 1.342.055.657	Rp 166.990.860	3 kali	Rp 144.940.860	97,05	Rp 258.781.567	Rp 570.713.287	43%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n 2 (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2019)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7-9)	11=10/4
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Rp 371.280.000	Rp -	5 dokumen			Rp -	Rp -	0%
	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial Budaya	Rp 5.836.018.223	Rp 144.641.080	5 dokumen	Rp 396.216.300	93,69	Rp 349.794.000	Rp 890.561.380	15%
	Kegiatan Koordinasi, Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	- Terlaksananya Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengumpulan Data Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, Terlaksananya Rapat-Rapat koordinasi, Konsultasi dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan	Rp 616.950.168	Rp 100.832.580	1 Dokumen	Rp 317.663.100	93,37	Rp 265.000.000	Rp 683.495.680	111%
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan program - Program Penanggulangan kemiskinan		Rp 476.156.282	Rp 43.808.500	8 Dokumen	Rp 78.553.200	94,98	Rp 84.704.000	Rp 207.065.700	43%
	Program perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		Rp 4.742.911.773	Rp 293.204.447	1 Dokumen	Rp 474.113.390	98,47	Rp 347.000.000	Rp 1.114.317.837	23%
	Koordinasi perencanaan Infrastruktur Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur daerah	Rp 1.263.212.346	Rp 100.172.300	1 Dokumen	Rp 170.898.000	96,29	Rp 162.000.000	Rp 433.070.300	34%
	Koordinasi perencanaan Perumahan	Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan	Rp 925.917.171	Rp 24.862.069	1 Dokumen			Rp -	Rp 24.862.069	3%
	Koordinasi perencanaan Air minum dan Sanitasi	Tersedianya dokumen air minum dan sanitasi	Rp 1.522.360.105	Rp 135.911.898	1 Dokumen	Rp 303.215.390	99,75	Rp 185.000.000	Rp 624.127.288	41%
	Koordinasi perencanaan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan wilayah	Rp 1.031.422.151	Rp 32.258.180				Rp -	Rp 32.258.180	3%
	Program, Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek,		Rp 7.518.420.000	Rp -	5 Dokumen	Rp 254.707.100	95,04	Rp 1.250.000.000	Rp 1.504.707.100	20%
	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi		Rp 1.392.300.000	Rp -	1 Dokumen	Rp 254.707.100	95,04	Rp 250.000.000	Rp 504.707.100	36%
	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya		Rp 1.531.530.000	Rp -		Rp -		Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	16%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah n-3(2018)	Target dan Kinerja Program dan Kegiatan Tahun n-2 (2019)			Target Program dan Kegiatan Tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=10/4
	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek		Rp 1.531.530.000	Rp -		Rp -		Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	16%
	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup		Rp 1.531.530.000	Rp -		Rp -		Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	16%
	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan		Rp 1.531.530.000	Rp -		Rp -		Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	16%
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Rp 1.310.698.400	Rp 58.260.000	85%	Rp -		Rp 310.500.000	Rp 368.760.000	28%
	Peningkatan kapasitas kelembagaan litbang		Rp 356.210.607	Rp 58.260.000	1 paket bimtek			Rp 60.500.000	Rp 118.760.000	33%
	Penyebarluasan hasil penelitian dan		Rp 954.487.793			Rp -		Rp 250.000.000	Rp 250.000.000	26%

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia.

Kawasan lindung yang menjadi perhatian disini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya.

Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So'E, Kefamenanu, Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi.

Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende–Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng–Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu–Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai; Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan; Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Bappeda Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja SDM perencana pembangunan	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan program dan kegiatan	% Capaian kinerja program dan kegiatan setiap tahunnya
	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan di BPPPPD	% Penyerapan anggaran pada DPA BPPPPD mencapai pada setiap akhir tahun
Meningkatkan kapasitas SDM Perencana	Meningkatnya kualitas SDM perencana pembangunan melalui pendidikan formal dan teknis fungsional	% Aparatur Bappeda berpendidikan S1 dan S2
		Jumlah Aparatur BPPPPD mengikuti diklat perencanaan
Menyusun sistem perencanaan yang sesuai dengan kondisi lokal	Tersusnya rancangan produk hukum daerah yang mengatur perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya Perda Perencanaan dan Penganggaran
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan, antara lain :
		RPJPD
		RPJMD
		Renstra SKPD
		Renstra Kecamatan
		RKPD
		RKPD Perubahan
		Renja SKPD/Kecamatan
		Renja Perubahan SKP/Kecamatan
		KUA & PPAS
		KUA & PPAS Perubahan
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, provinsi dan nasional dalam rangka penguatan aspek akuntabilitas perencanaan pembangunan	Meningkatnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	% kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran, serta kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat kabupaten, provinsi dan Nasional
		Persentase SKPD yang menerapkan perencanaan secara terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan basis data yang <i>up-to-date</i> dan akurat

	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan	% keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes, Musrenbangcam dan Musrenbangkab
	Meningkatnya sarana dan prasarana serta fasilitasi perencanaan pembangunan dengan stakeholders	e- Planing
		Persentase SKPD yang menerapkan sistem informasi perencanaan dan monev terintegrasi secara <i>on-line</i>
Meningkatkan kerjasama kemitraan	Meningkatnya kerjasama kemitraan	Jumlah kerjasama LSM/NGO,PT, Lembaga Donor

Pada tahun anggaran 2021 ini terdapat 13 program dan 47 kegiatan dengan pagu dana sebesar Rp. 5.644.181.182 dapat dilihat pada tabel 3.3

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Perkiraan Mula Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 03 01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
4 03 01 01	PROGRAM SKPD		Larantuka		3.644.181.182				7.319.406.943
4 03 01 01 01	KEGIATAN								
4 03 01 01 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	Larantuka	100%	935.998.480			100%	1.000.000.000
4 03 01 01 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan jasa surat menyurat	Larantuka	970 Kali	6.255.700			1000 Kali	6.500.000
4 03 01 01 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi: Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan layanan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	12 Bln	132.000.000			12 Bln	200.000.000
4 03 01 01 01 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Larantuka	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	11.000.000			18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	1.278.000
4 03 01 01 01 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa Administrasi keuangan	Larantuka	12 Kali	44.071.140			12 Kali	48.000.000
4 03 01 01 01 01 08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah layanan jasa kebersihan kantor	Larantuka	35 Jenis	8.800.000			35 Jenis	7.274.500
4 03 01 01 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Larantuka	34 Jenis	19.983.135			36 Jenis	21.380.000
4 03 01 01 01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	Larantuka	1800 Buku	33.581.150			1800 Buku	38.000.000
4 03 01 01 01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Larantuka	3 Komponen	5.816.470			3 Komponen	6.100.000
4 03 01 01 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan	Larantuka	920 eksemplar	7.879.520			920 eksemplar	8.607.472
4 03 01 01 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman	Larantuka	3000 dos	63.888.000			3000 dos	70.276.800
4 03 01 01 01 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Kecamatan Larantuka, Provinsi dan Jakarta	60 kali	327.133.180			65 kali	353.846.488
4 03 01 01 01 01 20	Penyediaan jasa tenaga pendukung dari teknis pemerintahan	Jumlah tenaga Pendukung teknis dan pemerintahan (org)	Larantuka	18 Orang	275.590.205			20 Orang	303.149.226

KODE						Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Larantuka	100%	278.178.808			100%	182.095.744
4	03	4	03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	Larantuka		110.000.000				
4	03	4	03	01	02	7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Larantuka					
4	03	4	03	01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Larantuka	1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	29.009.448		1 unit gedung kantor untuk 12 Bulan	29.009.448
4	03	4	03	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 yang terpelihara	Larantuka	18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	92.584.360		18 unit = Roda 4 (2 unit), Roda 2 (16 unit)	101.842.796
4	03	4	03	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	Larantuka	22 unit = 20 AC, 2 Generator	13.310.000		22 unit = 20 AC, 2 Generator	14.641.000
4	03	4	03	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Larantuka	74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	33.275.000		74 unit = 41 laptop & komputer, 33 printer	36.602.500
4	03	4	03	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Perencanaan dan penganggaran/memiliki sertifikat	Larantuka	5 Orang	71.500.000			5 Orang	154.389.345
4	03	4	03	01	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	5 Orang	71.500.000		5 Orang	154.389.345
4	03	4	03	01	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pencapaian indikator kinerja SKPD	Larantuka	6 Dokumen	40.055.314			6 Dokumen	44.060.845
4	03	4	03	01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja SKPD	Larantuka	6 Dokumen	40.055.314		6 Dokumen	44.060.845
						Urusan Perencanaan Pembangunan								
4	03	4	03	01	15	Program Pengembangan Data/Informasi	Jumlah dokumen data dan Informasi	Larantuka	1 Dokumen	168.261.027			1 Dokumen	185.087.130
4	03	4	03	01	15	02	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Larantuka	1 Dokumen	36.218.159		1 Dokumen	39.839.974
4	03	4	03	01	15	05	Penyusunan Profile Daerah	Jumlah dokumen profil daerah	Larantuka	1 Dokumen	76.978.046		1 Dokumen	84.675.851
4	03	4	03	01	15	10	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Jumlah bulan pengelolaan SIPD Pembangunan Daerah secara online	Larantuka	12 Bulan	23.680.281		12 Bulan	26.048.309
4	03	4	03	01	15	11	Pengumpulan dan penyusunan data/informasi geospasial	Tersedianya data / informasi geospasial	Larantuka, Kupang, Jakarta	12 Bulan	31.384.541		12 Bulan	34.522.996
4	03	4	03	01	16	Program Kerjasama Pembangunan	Jumlah LSM/NGO yang bekerjasama	Larantuka	13 LSM / NGO	110.000.000			14 LSM/NGO,	314.012.569
4	03	4	03	01	16	22	Koordinasi kerjasama kemitraan dengan LSM/NGO	Jumlah LSM / NGO yang bekerjasama	Larantuka	13 LSM / NGO	110.000.000		14 LSM/NGO,	314.012.569

KODE							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021						
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4	03	01	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/pelatihan perencanaan	Larantuka,Kupang, Jakarta	100 Orang	55.000.000			100 Orang	103.809.931
4	03	4	03	01	20	02	Sosialisasi Kebijakan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti pelaksanaan rapat koordinasi bidang perencanaan pembangunan daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	100 Orang	55.000.000			100 Orang	103.809.931
4	03	4	03	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Larantuka,Kupang, Jakarta	8 Dokumen	1.087.095.641			16 Dokumen	1.406.830.544
4	03	4	03	01	21	08	Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD, RKPD Perubahan dan Rancangan Awal RKPD tahunan n+1	Larantuka, Kupang	3 Dokumen; Rancangan Awal RKPD 2022, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020	440.000.000			3 Dokumen, Rancangan Awal RKPD 2022, RKPD 2021, RKPD Perubahan Tahun 2020	507.923.162
4	03	4	03	01	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang	Jumlah Kesepakatan untuk penyusunan rancangan akhir RKPD	Larantuka, Provinsi dan Jakarta	200 orang	275.000.000			200 orang	376.701.752
1	06	06	21	18	18	18	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan DAK, Dekon dan TP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi DAK, Dekonstrasi dan tugas pembantuan	Larantuka, Kupang, Jakarta	2 Dokumen	67.043.900			2 Dokumen	178.948.716
4	03	4	03	01	21	21	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	Larantuka, Kupang	2 Dokumen	155.051.741			2 Dokumen	178.256.915
4	03	4	03	01	21	38	Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	165.000.000
4	03	4	03	01	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Ekonomi	Larantuka,Kupang, Jakarta	6 Dokumen	415.167.513			6 Dokumen	563.164.264
4	03	4	03	01	22	03	Penyusunan Perencanaan Pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat	Larantuka,Kupang, Jakarta	1 Dokumen	130.507.790			1 Dokumen	143.558.568
4	03	4	03	01	22	04	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Tersedianya buku data base bidang ekonomi		4 Dokumen	284.659.724			4 Dokumen	313.125.696
4	03	4	03	01	22	08	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Jumlah dokumen monev dan pelaporan						1 Dokumen	106.480.000

KODE						Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4	03	01	23	Program Perencanaan Pembangunan bidang Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Sosial budaya dan pemerintahan		5 Dokumen	384.674.400			5 Dokumen	219.615.000
4	03	4	03	01	23	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial, budaya dan pemerintahan	Tersedianya buku data base bidang sosial budaya dan pemerintahan	Larantuka- Kupang- Jakarta	4 Dokumen	291.500.000			4 Dokumen	126.681.565
						Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan		Larantuka- Kupang- Jakarta	1 Dokumen	93.174.400			1 Dokumen	92.933.435
4	03	4	03	01	24	Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Larantuka, Kupang, Jakarta	8 Dokumen	381.700.000			8 Dokumen	1.137.425.616
4	03	4	03	01	24	Koordinasi Perencanaan Infrastruktur Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan Infrastruktur Daerah	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen	178.200.000			4 Dokumen	302.938.395
4	03	4	03	01	24	Koordinasi Perencanaan Perumahan	Tersedianya dokumen Perencanaan Perumahan	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen				1 dokumen	222.049.652
4	03	4	03	01	24	Koordinasi Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	Tersedianya dokumen Perencanaan Air Minum dan Sanitasi	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen	203.500.000			1 dokumen	365.086.146
4	03	4	03	01	24	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dokumen Perencanaan Pengembangan Wilayah	Larantuka, Kupang, Jakarta	1 dokumen				1 dokumen	247.351.423
4	03	4	03	01	33	Program Penelitian Pengembangan Ekonomi, Sosial, Budaya, Iptek ,Lingkungan Hidup dan Pemerintahan		Larantuka	6 Dokumen	1.650.000.000			6 Dokumen	2.156.220.000
4	03	4	03	01	33	Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Ekonomi	Larantuka	1 Dokumen	275.000.000			1 Dokumen	399.300.000
4	03	4	03	01	33	Penelitian Pengembangan Bidang Sosial Budaya	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang SosBud	Larantuka	1 Dokumen	275.000.000			1 Dokumen	439.230.000
4	03	4	03	01	33	Penelitian Pengembangan Bidang Iptek	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang IPTEK	Larantuka	1 Dokumen	275.000.000			1 Dokumen	439.230.000
4	03	4	03	01	33	Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup	Larantuka	1 Dokumen	275.000.000			1 Dokumen	439.230.000
4	03	4	03	01	33	Penelitian Pengembangan Bidang Pemerintahan	Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian Pengembangan Bidang Lingkungan Pemerintahan	Larantuka	1 Dokumen	275.000.000			1 Dokumen	439.230.000
4	03	4	03	01	33	Penyebarnya Hasil Penelitian dan Pengembangan	Tersebarluasnya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Larantuka	2 Dokumen	275.000.000				

KODE							Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1							2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	03	4	03	01	33		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian dan Pengembangan Daerah		Larantuka	1 Dokumen	66.550.000			1 Dokumen	362.032.000
4	03	4	03	01	33	7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaag Litbang Daerah	Tersedianya Aparatur Peneliti	Larantuka	5 Orang	66.550.000			1 Dokumen	85.424.964
4	03	4	03	01	33	7	Penyebarluasan Hasil Penelitian dan Pengembangan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan	Larantuka					1 Dokumen	276.607.036

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* , yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Sedangkan Rancangan Rencana kerja dan Pendanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (RENJA BPPPPD) merupakan dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021 ini dibuat untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun dan sebagai penjabaran dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur

Larantuka, 2020
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Flores Timur



Drs. Theodorus L. Hadjon, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19620125 198503 1 008